



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI
Dengan	: MENTERI AGAMA RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 13 Januari 2022.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Perkembangan Kebijakan Umrah; 2. Pembicaraan Pendahuluan BPIH Tahun 1443 H/2022 M 3. Pembentukan Panja BPIH Tahun 1443 H/ 2022M.
Ketua Rapat	: H.Yandri Susanto, S.Pt
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 45 dari 49 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 3 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Wakil Menteri Agama RI Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.30 WIB dan dinyatakan Terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi oleh Wakil Ketua Dr. H. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si Dan Laksdya TNI (Purn) Moekhlis Sidik, MPA. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI yang diwakili oleh Wakil Menteri Agama RI membahas **“Perkembangan Kebijakan Umrah, Pembicaraan Pendahuluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 M, dan Pembentukan Panitia Kerja BPIH”**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI telah mendapatkan penjelasan dari Wakil Menteri Agama RI mengenai:
 - a. Kebijakan penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi. Selanjutnya, untuk mengantisipasi kenaikan penyebaran Covid-19 akibat adanya varian baru, Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama RI untuk mengedepankan perlindungan dan keselamatan jemaah dengan meningkatkan pengawasan kepatuhan atas penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
 - b. Rencana kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1443 H/2022 M akibat masih adanya pandemi Covid-19 sebagai bahan awal pembahasan lebih lanjut dalam rapat-rapat Panja BPIH.
2. Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama RI sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) BPIH tahun 1443 H/2022 M serta secepatnya dapat memulai pembahasan mengenai asumsi dasar dan rincian komponen BPIH.
3. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama RI untuk menindaklanjuti pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, di antaranya:
 - a. Menindaklanjuti usulan pengecualian pengenaan biaya visa haji bagi jemaah Indonesia kepada Pemerintah Arab Saudi.
 - b. Meningkatkan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi mengenai kepastian penyelenggaraan dan kuota haji bagi jemaah Indonesia.
 - c. Merumuskan kebijakan pemberangkatan calon jemaah umrah melalui Asrama Haji Embarkasi di daerah apabila di Embarkasi tersebut terdapat penerbangan langsung ke Arab Saudi dan opsi lain.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 13.25 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



H.YANDRI SUSANTO, Spt.